



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI HARAHAP
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 699622

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m²/177 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 483 m²/483 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m²/455 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m²/189 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m²/12 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 517.500.000

1. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6H F A/T SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 892.864.402**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.430.364.402
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.430.364.402

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.